

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Mata Kuliah : PKN
Program Studi : S1 PGSD
Semester/Kelas : 2/F
Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.



Disusun Oleh:

Qonita Mardhia Suhendro (2413053193)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG 2025**

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?

3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?

4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?

JAWABAN

1. Tanggapan terhadap Isi Berita dan Hal Positif yang Bisa Diambil

Berita ini menunjukkan dampak dari unjuk rasa terhadap penyebaran Covid-19. Di satu sisi, mahasiswa dan buruh menyalurkan aspirasi mereka terkait UU Cipta Kerja sebagai bentuk partisipasi dalam demokrasi. Namun, di sisi lain, aksi ini juga meningkatkan risiko penularan virus, terutama karena kerumunan massa yang sulit dikendalikan dalam situasi pandemi. Hal ini menjadi dilema antara hak menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga kesehatan masyarakat.

Hal positif yang bisa diambil:

Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah demonstrasi besar.

Pembelajaran bagi mahasiswa bahwa menyalurkan pendapat harus dilakukan secara cerdas dan strategis. Kesadaran bahwa aspirasi bisa disampaikan tidak hanya melalui demonstrasi, tetapi juga lewat kajian akademis atau jalur hukum.

2. Tata Cara Mengemukakan Pendapat dan Alternatif di Tengah Pandemi

Demonstrasi merupakan salah satu hak dasar dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, hak ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tetap menghormati aturan yang berlaku. Tindakan merusak fasilitas umum bukan hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama demonstrasi itu sendiri. Alih-alih membawa perubahan positif, tindakan anarkis justru merugikan masyarakat luas, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam aksi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap demonstran untuk menjaga ketertiban, menjunjung tinggi etika, serta mencari cara yang lebih konstruktif dalam menyampaikan pendapat.

Alternatif penyampaian aspirasi yang lebih baik di masa pandemi:

Kajian akademis: Mahasiswa dapat melakukan diskusi ilmiah dan mengajukan rekomendasi tertulis kepada pemerintah.

Kampanye digital: Media sosial bisa menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi dan menggalang dukungan.

Audiensi dengan pemerintah atau DPR: Langkah konkret dengan mengajukan audiensi resmi untuk menyampaikan pendapat.

Petisi daring: Mengumpulkan tanda tangan secara online untuk menunjukkan dukungan terhadap suatu isu.

3. Solusi Benturan Kepentingan antara Pengusaha dan Buruh

Benturan kepentingan ini bisa diselesaikan dengan keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak, seperti:

Negosiasi dan mediasi: Buruh dan pengusaha harus memiliki ruang dialog yang terbuka untuk mencapai solusi terbaik.

Regulasi yang adil: Pemerintah harus memastikan UU yang dibuat tidak berat sebelah, baik bagi buruh maupun pengusaha.

Peningkatan keterampilan buruh: Agar buruh lebih siap menghadapi perubahan kebijakan dan persaingan global.

Insentif bagi pengusaha yang adil: Pemerintah bisa memberi insentif bagi perusahaan yang tetap menjaga hak-hak buruh dengan baik.

4. Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis antara Negara dan Warga Negara

Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah:

Transparansi kebijakan: Pemerintah harus terbuka dalam menyusun kebijakan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Peningkatan partisipasi masyarakat: Warga negara harus diberi ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat tanpa takut dikriminalisasi.

Penegakan hukum yang adil: Semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Pendidikan kewarganegaraan yang lebih kuat: Agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dengan baik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih harmonis.